



Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2015 - 2019



KATA PENGANTAR

Pusat Penyuluhan sebagai Institusi Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung tercapainya Sasaran, Tujuan, Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Penyusunan Rencana Strategis Pusat Penyuluhan ini mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015 – 2019 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.40/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Renstra Penyuluhan disusun mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM serta Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berlaku lima tahun (Tahun 2015 – 2019) dan apabila dikemudian hari ada perubahan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Renstra tersebut akan direvisi dan disesuaikan selaras dengan dengan program dan kegiatan yang diambil.

Kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan guna mendukung terwujudnya Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera.

Kepala Pusat,

Dra. Siti Aini Hanum, MA
NIP.195802071984032001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Hasil Pembangunan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014	4
1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluhan	8
1.4 Potensi dan Masalah	12
BAB II. ANALISA LINGKUNGAN STRATEJIK	15
2.1 Kerangka Pemikiran dan Asumsi	15
2.2 Asumsi dalam penyusunan Renstra.....	17
BAB III. PENYUSUNAN SASARAN ELEMEN KEGIATAN DAN INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN	20
BAB IV. SASARAN STRATEJIK	23
BAB V. PENYUSUNAN PENDANAAN	25
BAB VI. PENUTUP.....	27
 LAMPIRAN	

barang-barang tambang seperti emas, perak, batu bara, nikel, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Barang-barang tambang tersebut merupakan salah satu sumber utama bagi pendapatan manusia, dimana barang-barang tambang tersebut nantinya dapat diolah menjadi berbagai jenis produk seperti perhiasan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Selain barang-barang tambang tersebut, ketersediaan hewan dan tumbuhan juga ikut mendukung perekonomian manusia, seperti untuk peternakan, perkebunan, pertanian, nelayan maupun sebagai bahan baku serta bahan mentah untuk industri. Untuk potensi bidang kehutanan berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk kandungan keanekaragaman hayati di dalamnya, dengan berbagai ragam potensi yang dimiliki tersebut, sistem pengelolaan hutan harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi produksi, ekologis serta fungsi sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat di dalam dan disekitar hutan serta pemanfaatan nilai potensi SDH tidak boleh berlebihan karena dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kepunahan suatu habitat disekitarnya.

Pembangunan Kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu bahwa pengurusan sumber daya alam hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem, dan dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan urusan kehutanan diimplementasikan dalam 4 upaya pokok yaitu : (1) perencanaan hutan, (2) pengelolaan hutan, (3) penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan , (4) pengawasan dan pengendalian.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan unsur lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan. Sumber daya yang mendukung pembangunan antara lain sumber daya alam yaitu air, tanah, udara, kemudian sumber daya manusia, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi dan pembangunan berwawasan lingkungan (pemerintah menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan integratif dan menggunakan pandangan jangka panjang).

Realitas yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan, yaitu adanya fenomena deforestasi dan degradasi fungsi hutan, sehingga berdampak pada optimalisasi fungsi hutan baik fungsi ekologis, fungsi ekonomis dan fungsi social, sehingga turut berpengaruh terhadap pencapaian “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera”.

Urgensi kebutuhan SDM LHK berkualitas, karena penyelenggaraan pembangunan kehutanan saat ini dan ke depan semakin kompleks, untuk pembangunan

berkelanjutan berwawasan lingkungan meliputi : 1) Keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. 2) Setiap pembangunan ekonomi mendukung juga pembangunan sosial dan sebaliknya. 3) Efek positif maupun negatif terhadap lingkungan sudah diprediksi pada saat program pembangunan berjalan, sehingga langkah yang ditempuh dapat meminimalisir efek buruk terhadap lingkungan. Pembangunan kehutanan meliputi ; 1) Kesatuan pengelolaan hutan (KPH). 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan melalui pengembangan HKm, Hutan Desa, HTR, pengembangan desa konservasi, hutan rakyat serta pengembangan komoditas kehutanan berupa kayu dan HHBK termasuk usaha jasa pariwisata alam.

Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan membawa konsekwensi terhadap pengembangan organisasi penyuluhan di pusat maupun daerah. Pada tiga kementerian, masing-masing dibentuk pusat penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada masing-masing Kementerian.

Di daerah kelembagaan yang mengurus penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan diwadahi dalam 1 (satu) organisasi yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan yang diketahuai Gubernur dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi dipimpin oleh pejabat Eselon II, sedangkan di Kabupaten / Kota dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), dan di Kecamatan diwadahi dalam Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sampai ke desa yang diwadahi dalam Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perubahan nomenklatur pengelolaan dana dekonsentrasi di tingkat provinsi, untuk fungsi pusat sebagai institusi penyelenggara penyuluhan dan untuk propinsi sebagai unsur pelaksana.

Keberadaan kelembagaan penyuluhan dari pusat sampai ke daerah sebagaimana tersebut diatas, diharapkan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tetap dapat terselenggara dengan baik.

1.2 Hasil Pembangunan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014

Peningkatan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Laporan Pembinaan dan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan target 6 laporan yang terdiri dari ;
 - a. Pembinaan dan Evaluasi Pegawai, 1 Laporan.
 - b. Inhouse Training Multimedia, 1 Laporan.
 - c. Pembinaan Penyuluh Kehutanan, 1 Laporan.
 - d. Temu Teknis PKSM, 1 Laporan.
 - e. Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS), 1 Laporan.
 - f. Sarana Penyuluhan Kehutanan, 1 Laporan.
- 2) Materi Penyuluhan Kehutanan target output 15 Materi dengan realisasi output sejumlah 17 materi, yaitu :
 - a. Buku Kerja;
 - b. Buku kumpulan peraturan perundang-undangan;
 - c. Buku materi Dialogis;
 - d. Buku materi SVLK;
 - e. Leaflet Kemitraan;
 - f. Booklet HHBK;
 - g. Buku Saku Penyuluhan Kehutanan;
 - h. Buku Kinerja dan Tantangan Penyuluhan Kehutanan;
 - i. Kisah Sukses Teladan Wana Lestari Tahun 2014;
 - j. Draft Permenhut No.P.27/Menhut-II/2013;
 - k. Draft Permenhut No.P57/Menhut-II/2014;
 - l. Publikasi penyuluhan kehutanan di media massa;
 - m. Penyusunan dan pembuatan materi penyuluhan kehutanan di media elektronik;
 - n. Penayangan radio spot “Hari Menanam Pohon Indonesia”;
 - o. Penerbitan majalah Kenari;
 - p. Buku Profil Kelompok Usaha Produktif (KUP);
 - q. Buku Materi tentang Aren.
- 3) Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Bidang Penyuluhan Kehutanan target output 4 Draft yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan Permenhut tentang Mekanisme Kerja, 1 draft.
 - b. Penyusunan Draft Tata Hubungan Kerja Penyuluhan Kehutanan, 1 draft.
 - c. Penyusunan Draft JUKNIS tentang Pembinaan PKS, 1 draft.

- d. Penyusunan Draft JUKNIS tentang PKSM, 1 draft.
- 4) Laporan Hasil Kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM) dan Kecil Menanam Dewasa Menganan (KMDM), 1 kegiatan, dilaksanakan melalui penanaman pohon bersama Presiden RI di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada gambar 2 :

Gambar 2. Penanaman pohon bersama Presiden RI Bp. Ir. Djoko Widodo



- 5) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran target outputnya 3 dokumen yang terdiri dari:
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014 sejumlah 1 Dokumen;
 - Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014 sejumlah 1 Dokumen; dan
 - Penyusunan Dokumen RENSTRA Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2015 - 2019 sejumlah 1 Dokumen.
- 6) Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan target 22 Laporan yang terdiri dari ;
- Penyusunan Laporan Monev BMN dan Kearsipan, 1 Laporan.
 - Laporan Monev Penyuluhan Kehutanan, 1 Laporan.
 - Laporan Satker dan LAKIP Tahun 2013 yang meliputi:
 - Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan, 18 Laporan.
 - Laporan Akutabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), 1 Laporan.
 - Laporan Updating data dan statistik, 1 Laporan.
- 7) Lomba Wana Lestari target 2 Kegiatan yang terdiri dari Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2014, 1 Kegiatan dan Temu Karya/Sarasehan, 1 Kegiatan. Output tercapai sesuai target.

Gambar 3. Temu Karya para Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2014 dengan Presiden RI.



- 8) Laporan Penyusunan Dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan target 1 Laporan. Output tercapai sesuai target.
- 9) Fasilitasi Percontohan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat target sebanyak 62 unit.
- 10) Fasilitasi Kemitraan Penyuluhan Kehutanan target output 2 Laporan yang terdiri dari Laporan Kegiatan Fasilitasi IPKINDO/HPHA, 1 Laporan dan Laporan Penyelenggaraan Sekretariat KPN, 1 Laporan. Output kegiatan sesuai dengan target.
- 11) Penyelenggaraan Kegiatan Bakti Sarjana Kehutanan (BASARHUT) dengan target sebanyak 120 orang dengan realisasi fisik output kegiatan sebanyak 119 orang.

Gambar 4. Peresmian Bakti Sarjana Kehutanan yg ditempatkan di KPH oleh Menteri Kehutanan Bp. Zulkifli Hasan, SE, MM



- 12) Layanan Perkantoran, 12 bulan layanan :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 13) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa:
 - a. Pengadaan Meja Kerja, 8 Unit.
 - b. Pengadaan Lemari Arsip, 2 Unit dan pengadaan kursi, 8 Unit.

Secara ringkas capaian kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1, berikut ;

Tabel 1. Rincian Realisasi Fisik dan Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014

No	Output Kegiatan	Target	Realisasi Fisik	% Cap. Fisik	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Laporan Pembinaan dan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	6 Lap	6 Lap	100	2.569.694.000	2.351.757.519	91,52
2	Materi Penyuluhan Kehutanan	15 Materi	17 Materi	113	2.019.430.000	1.787.292.250	88,50
3	Pedoman/Juklak/Juknis Bidang Penyuluhan Kehutanan	4 Draft	4 Draft	100	449.000.000	369.975.800	82,40
4	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	3 Dok.	3 Dok.	100	749.689.000	540.374.750	72,08
5	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan	22 Lap.	22 Lap.	100	1.356.960.000	1.094.036.735	80,62
6	Laporan Penyusunan Dokumen Program Penyuluhan Kehutanan.	1 Lap.	1 Lap.	100	95.778.000	55.968.920	58,44
7	Layanan Perkantoran.	12 Bulan	12 Bulan	100	4.717.542.000	4.263.554.677	90,38
8	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	18 Unit	18 Unit	100	35.500.000	32.980.000	92,90
9	Gedung/Bangunan.	148 M2	148 M2	100	199.400.000	194.707.838	97,65
10	Kemitraan Penyuluhan Kehutanan.	2 Lap.	2 Lap.	100	596.950.000	472.111.670	79,09
11	Bakti Sarjana Kehutanan (BASARHUT).	120 Orang	119 Orang	99,17	4.219.500.000	4.047.206.400	95,92
12	Kampanye Indonesia Menanam (KIM) dan Kecil Menanam Dewasan Memanen (KMDM).	1 Keg.	1 Keg.	100	524.870.000	490.679.350	93,49
13	Lomba Wana Lestari.	2 Keg.	2 Keg.	100	2.197.544.000	2.045.448.400	93,08
14	Fasilitasi Percontohan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat.	62 Unit	62 Unit	100	2.341.500.000	2.146.535.075	91,67
Jumlah Nilai Total				100,86	22.073.357.000	19.892.629.384	90,12

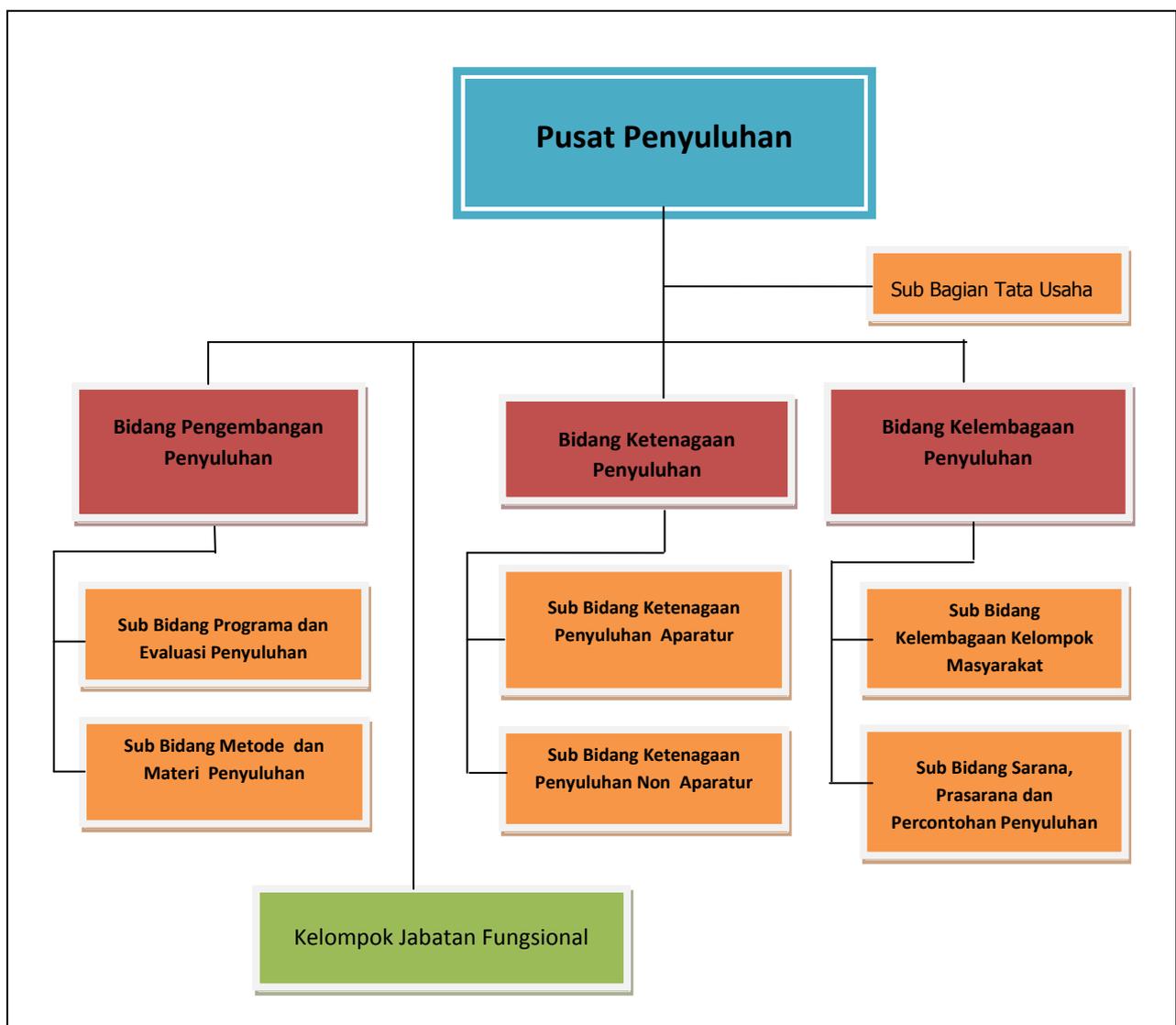
1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluhan

Penyusunan sasaran dan indikator kegiatan Pusat Penyuluhan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pusat Penyuluhan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MENLHK-II/2015 sebagai berikut :

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi penyuluhan kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MENLHK-II/2015 sebagai berikut, gambar 5, berikut :

Gambar 5. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan (Permen LHK No.P.18/MENLHK-II/2015)



1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluhan

Susunan Organisasi **Pusat Penyuluhan** terdiri dari tiga Eselon III dan tujuh Eselon IV, yaitu :

- a. Bidang Pengembangan Penyuluhan;
- b. Bidang Ketenagaan Penyuluhan;
- c. Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
- d. Sub Bagian Tata Usaha.
- e. Sub Bidang Programa dan Evaluasi;
- f. Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan;
- g. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur;
- h. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur;
- i. Sub Bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat;
- j. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Percontohan Penyuluhan.

1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Penyuluhan :

Tugas Pusat Penyuluhan : melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

Fungsi Pusat Penyuluhan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

1.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan :

Tugas Bidang Pengembangan Penyuluhan : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan; dan

- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan;

1.3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan :

Tugas Bidang Ketenagaan Penyuluhan : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

1.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan:

Tugas Bidang Kelembagaan Penyuluhan : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan;
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

1.3.7 Tugas Pokok dan Fungsi Eselon Empat Lingkup Pusat Penyuluhan

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana sudah disebut di atas melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- b. **Subbidang Program dan Evaluasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan program penyuluhan.
- c. **Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan metode dan materi penyuluhan.

- d. **Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan aparatur di daerah;
- e. **Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan non aparatur di daerah.
- f. **Subbidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan kelompok masyarakat.
- g. **Subbidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan percontohan penyuluhan.

1.3.8 Tugas Pokok Pejabat Fungsional Penyuluh

Tugas pokok Penyuluh melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Penyuluh Kehutanan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja, sebagaimana tugas penyuluh kehutanan adalah pendampingan kelompok tani hutan, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Penyuluh Kehutanan sedang menerima motor dan melaksanakan sekolah lapang



1.4 Potensi dan Permasalahan

1.4.1 Potensi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memfokuskan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan, sumber daya alam yang dashyat dengan potensi 66,3 persen kawasan hutan harus dikelola dengan baik dan optimal.

Peranan penyuluh kehutanan bidang LHK menjadi sangat penting dan strategis sebagai mediator, inovator, motivator maupun transformator yang akan merajut akar permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Potensi peran penyuluh LHK dalam bidang lingkungan hidup meliputi : a. Penurunan beban pencemaran lingkungan ; b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup; c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Peranan penyuluh dalam bidang kehutanan sangatlah penting dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai masalah kehutanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Sebagai contohnya, penyuluh mempunyai peran besar dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya di sekitar hutan untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan, disamping itu pembangunan kehutanan yang berkelanjutan sangat membutuhkan SDM Penyuluh LHK sebagai agen pembaharuan yang kompeten dan professional.

Gambar 7. Penyuluh sedang melaksanakan tugas di dalam dan di luar ruangan



Peran lain, penyuluh LHK potensial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut difasilitasi melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM) serta turut serta dalam pendampingan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang akan melibatkan tugas dan fungsi seluruh Instansi Kehutanan baik pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat setempat, sehingga

untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan di lapangan diperlukan informasi tentang misalnya, Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Dan jenis tanaman yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat terdiri dari tanaman pokok dan tanaman tumpang sari.

Potensi secara yuridis urusan penyuluhan mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

1.4.2 Permasalahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan penggabungan dua kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan tentunya hal ini merupakan suatu persoalan yang rumit dan berat karena ruang lingkungannya luas dan spesifik. Namun dengan terbentuknya Kementerian LHK ini haruslah kementerian ini menjadi jawaban terhadap seluruh persoalan lingkungan hidup dan kehutanan.

Gambar 8. Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Tantangan utama yang harus di jawab oleh Kementerian LHK ke depan adalah bagaimana setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan, ragam hayatinya tidak pernah berkurang baik populasi dan nilainya. Sehingga, setiap upaya Kementerian LHK ke depan akhirnya harus memberi keyakinan kepada generasi penerus kita bahwa pada saatnya nanti, setiap sumberdaya hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi mereka akan memanfaatkannya sehingga tercapainya hutan lestari masyarakat sejahtera.

Permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan seperti pada gambar 5, berikut :

Gambar 9. Permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup dan kehutanan

<p>a. Pencemaran limbah yang dibuang ke lingkungan oleh industri masih di atas rata-rata 10% dan udara tercemar akibat asap industri dan kebakaran hutan;</p>	
<p>b. Peningkatan kinerja industri dari "tidak taat" ke "taat" masih di atas 20 % melanggar aturan.</p>	
<p>c. Limbah B3 belum dikelola dengan baik;</p>	
<p>d. Illegal Logging dan Lahan Kritis;</p>	
<p>e. Perdagangan Satwa Liar.</p>	

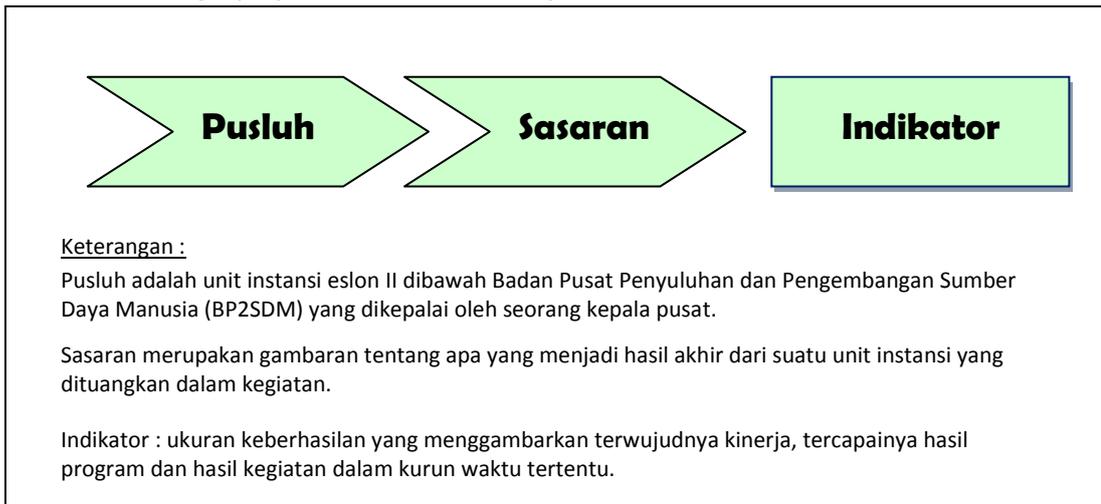
BAB II

ANALISA LINGKUNGAN STRATEJIK

2.1 Kerangka Pemikiran dan Asumsi

Kerangka pemikiran penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Pusat Penyuluhan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana , gambar 6 :

Gambar 10 : Kerangka penyusunan Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2015 – 2019



Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Sesuai tugas dan fungsi organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, maka seluruh aktivitas kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan unit organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama periode Tahun 2015 – 2019 ditampung dalam *Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM* dengan sasaran berupa:

- a. ***Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.***
- b. Meningkatkan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Badan P2SDM menyusun enam kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan Pengembangan SDM;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
- d. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
- e. Peningkatan Penyuluhan;**
- f. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;

Strategi pencapaian sasaran program Badan P2SDM sampai Tahun 2019 adalah:

- a. Penguatan kebijakan SDM pembangunan LHK
- b. Penguatan jejaring pengembangan SDM LHK
- c. Mengefektifkan hubungan para pihak (internal maupun eksternal) untuk meningkatkan kompetensi SDM LHK
- d. Meningkatkan daya saing SDM LHK melalui sertifikasi kompetensi

Berdasarkan sasaran program yang pertama, maka target untuk Peningkatan Penyuluhan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada tabel 2, berikut :

Tabel 2. Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2015-2019
1. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi. • Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang. • Jumlah SDM Aparatur LHK/SMK Kehutanan yang meningkat kapasitasnya, 37.640 orang.

- a. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Renstra BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

- b. Kedudukan, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.
- c. Tersedia Input pada satuan kerja Eselon II Pusat Penyuluhan yaitu : SDM pada Pusat Penyuluhan sebagai pelaksana dan anggaran dan dana, serta ketersediaan regulasi untuk mendukung struktur, kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima tahun ke depan.

2.2. Asumsi dalam penyusunan Renstra

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015 – 2019, yaitu mewujudkan *“Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari untuk kesejahteraan rakyat, dan menuju pada pembangunan berkelanjutan”*.

Tujuan pembangunan KLHK mempunyai peran utama : 1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; 2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta menjaga kepunahan jenis, menjaga hutan; 3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Dalam RPJMN Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019, indikator kegiatan penyuluhan dalam mendukung Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Tahun 2015 – 2019 adalah : **“Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya sebanyak 5.500 unit KTH”**, dengan empat sasaran indikator, sbb :

- a. Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 5000 unit;
- b. Terbentuknya koperasi kelas kelompok tani hutan sejumlah 500 unit;
- c. Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 250 unit;
- d. Meningkatnya kapasitas jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5000 orang.

Keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra Pusat Penyuluhan, yaitu :

a. Kelembagaan :

- 1) Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 5000 unit;
- 2) Terbentuknya koperasi kelas kelompok tani hutan sejumlah 500 unit;
- 3) Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 250 unit;
- 4) Terwujudnya Kelembagaan Penyelenggara Penyuluhan yang akuntabel baik kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan sektor pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat.
- 5) Tersedianya NSPK Penyuluhan bagi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di daerah.

b. Ketenagaan

- 1) Meningkatnya kapasitas jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5000 orang.

- 2) Tersedianya SDM penggerak organisasi penyelenggara penyuluhan kehutanan yang handal dan kompeten baik, pada organisasi penyelenggaraan penyuluhan pusat dan daerah sampai di tingkat tapak.
- 3) Tersedianya tenaga penyuluh LHK yang handal, kompeten dan professional.

c. Pengembangan

- 1) Tersedianya program penyuluhan yang berkualitas.
- 2) Tersedianya materi, metoda, alat bantu dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan yang memenuhi syarat minimal.

BAB III

PENYUSUNAN SASARAN ELEMEN KEGIATAN DAN INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN

Penyusunan sasaran elemen kegiatan dan indikator kegiatan pusat penyuluhan didasarkan pada analisis SWOT, sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran). Analisa SWOT mempunyai aspek S = Strength (kekuatan); W = Weaknesses (kelemahan); O = Opportunities (Peluang); T = Threats (hambatan).

Permasalahan penyuluhan LHK dipetakan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Faktor internal sebagai pendorong kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) sedangkan faktor eksternal merupakan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Masing-masing pengelompokan tersebut dianalisa memakai SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunites dan Threats*) yang dipadukan dengan unsur-unsur manajemen: *man, money, material, method, machine, market, information* dan *environment*. Hasil analisa SWOT penyuluhan kehutanan sebagaimana tertuang pada tabel 3, berikut;

Tabel 3. Matrik SWOT

Strategi Kekuatan - Peluang (SO) (<i>Strenghts-Opportunities</i>)	Strategi Kelemahan – Ancaman (ST) (<i>Strenghts-Threats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kebijakan LHK dalam bidang pendampingan untuk melaksanakan pembangunan LHK di tingkat tapak. • Mendorong kebijakan peningkatan KTH dalam kegiatan (kenaikan kelas kelompok tani, koperasi, dll). • Mendorong pelaksanaan penyuluhan LHK tingkat provinsi dan kabupaten/kota. • Meningkatkan metode dan materi penyuluhan LHK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Kebijakan penyuluhan LHK untuk meningkatkan profesionalisme tenaga penyuluh sesuai tugas pokok dan fungsinya. • Mengoptimalkan SDM Penyuluh di tingkat tapak (PNS, PKSM, PKS) untuk mendukung pembangunan LHK untuk mengisi program LHK pusat, provinsi dan kab/kota. • Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh LHK.
Strategi Kelemahan – Peluang (WO) (<i>Weakness – Opportunities</i>)	Strategi Kelemahan – Ancaman (WT) (<i>Weakness –Threats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sinergitas antara program kementerian dengan pemerintah daerah di provinsi. • Memenuhi kebutuhan sarpras dan alat bantu penyuluhan kehutanan. • Menambah formasi penyuluh LHK . 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan di daerah. • Memantapkan kelembagaan penyuluhan LHK di provinsi dan kab/kota.

Hasil analisa internal dan eksternal pusat penyuluhan Kementerian LHK Tahun 2015-2019, kita dapatkan hasil sasaran elemen kegiatan :

- a. Meningkatkan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluhan LHK.
- b. Mengembangkan kelas KTH.
- c. Mengembangkan metode penyuluhan.
- d. Menyusun materi penyuluhan media cetak dan elektronik.
- e. Mengembangkan kelembagaan usaha KTH di dalam KPH dan HR.
- f. Mengembangkan unit percontohan dan pelatihan usaha kehutanan.
- g. Mengembangkan penyuluh aparatur dan non aparatur
- h. Mengembangkan kemitraan penyuluhan.
- i. Meningkatkan layanan perkantoran

Indikator dari masing-masing elemen tersebut diatas dikumpulkan sebagaimana tabel 4, berikut;

Tabel 4. Indikator elemen kegiatan

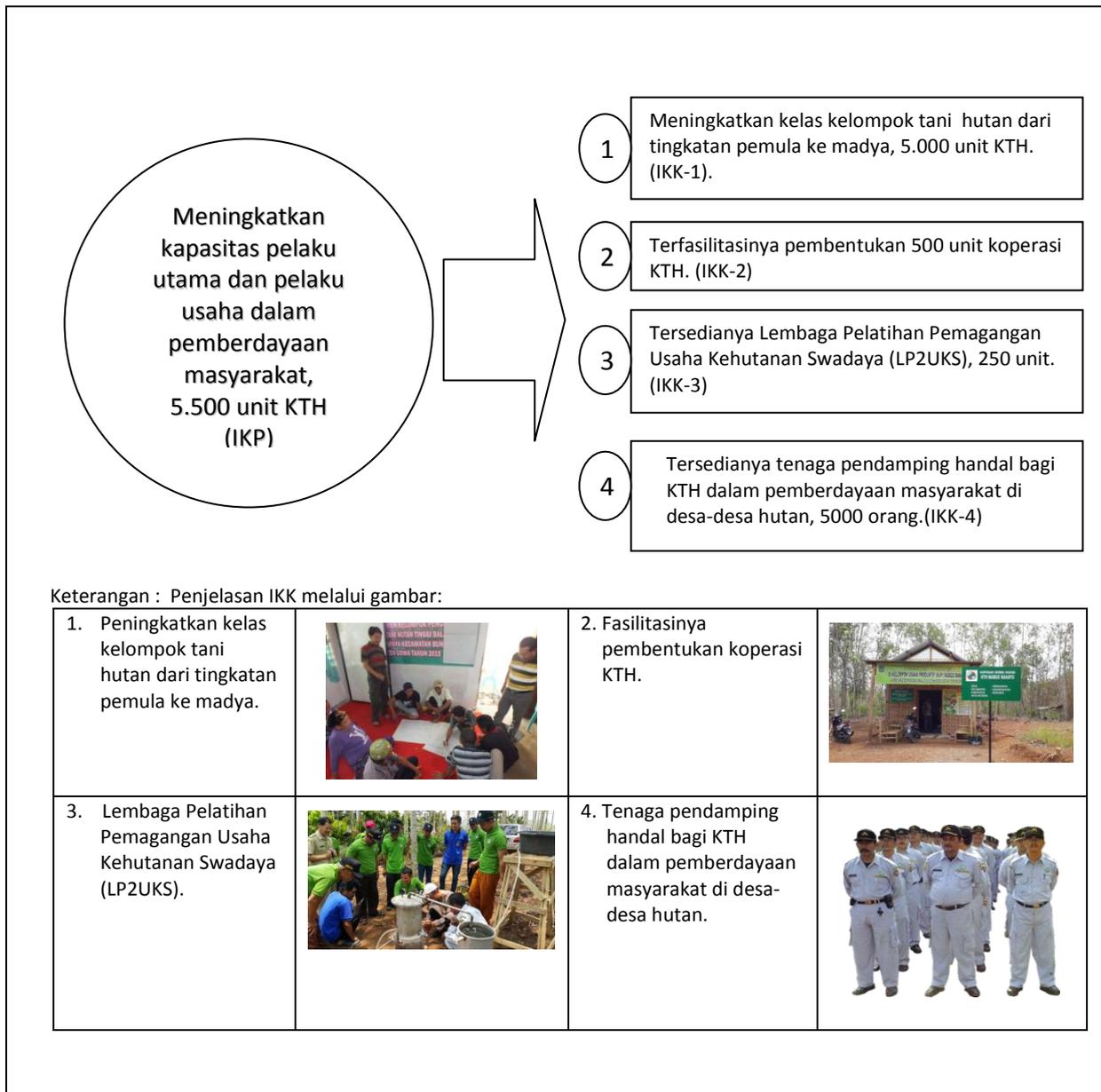
No.	SASARAN ELEMEN	INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN
1.	Meningkatkan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja penyuluhan LHK.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahunan.
		Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan
		Penyusunan Dokumen Program Pusat Penyuluhan.
		Updating data dan penyusunan statistik.
		Perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas KTH.
		Fasilitasi dana dekonsentrasi dan DAK
		Penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi penyuluhan.
2.	Mengembangkan kelas KTH.	Pembinaan Teknis KTH.
		Fasilitasi peningkatan kelas KTH
		Evaluasi peningkatan kelas KTH
3.	Tersedianya Metode Penyuluhan.	Penilaian Lomba Wana Lestari .
		Temu Karya Para Pemenang Lomba Wana Lestari.
		Penyelenggaraan KIM.
		Penyelenggaraan Pameran.
4.	Tersusunnya materi penyuluhan media cetak dan elektronik.	Penyusunan dan Publikasi materi penyuluhan di media.
		Penyusunan dan Publikasi materi penyuluhan di media elektronik.
		Penyusunan dan penggandaan buku kerja penyuluh PNS.
		Workshop pengembangan materi penyuluhan.
		Penyusunan dan penggandaan buku kerja PKSM.
		Penyusunan dan penggandaan buku saku Penyuluhan.
		Penggandaan manual tentang LP2UKS Wanawiyata

No.	SASARAN ELEMEN	INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN
		Widyakarya. Penggandaan manual tentang peningkatan kelas KTH. Penggandaan manual tentang koperasi. Penggandaan materi penyuluhan. Penggandaan buku profil KTH Madya. Penggandaan materi penyuluhan pemberdayaan. Penggandaan Buku Profil Teladan Penyuluh Nasional. Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari.
5.	Mengembangkan kelembagaan usaha KTH di dalam KPH dan HR.	Percontohan pemberdayaan masyarakat desa hutan konservasi. Identifikasi dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha KTH (Koperasi). Terfasilitasinya Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh pendamping koperasi. Evaluasi pengembangan kelembagaan usaha KTH (Koperasi).
6.	Tersedianya unit percontohan dan pelatihan usaha kehutanan.	Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Swadaya (LP2UKS). Identifikasi dan perencanaan pembentukan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) Pemagangan di Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Swadaya (LP2UKS). Fasilitasi percontohan PKSM di KPH.
7.	Terfasilitasinya pembinaan penyuluh Aparatur dan Non Aparatur	Pembinaan teknis penyuluh aparatur. Pembinaan Teknis Penyuluh Swadaya Masyarakat (PKSM) di KPH dan HR. Identifikasi dan perencanaan pembentukan tenaga pendamping handal bagi KTH. Pembinaan Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta.
8.	Terfasilitasinya Kemitraan Penyuluhan.	Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN). Fasilitasi kegiatan IPKINDO. Fasiltasi Kesekretariatan Badan koordinasi Nasional (BAKORNAS).
9.	Layanan Perkantoran	Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi. Penyusunan SPIP. Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan). Penyusunan LAKIP Satker Pusluh. Penyusunan laporan BMN.

BAB IV SASARAN STRATEGIK

Untuk mencapai indikator program (IKP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015 – 2019, Pusat Penyuluhan mengambil langkah sebagaimana gambar 12 berikut :

Gambar 12. Keterkaitan IKP dan IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2015 - 2019



Sasaran Stratejik Penyuluhan Tahun 2015 – 2019 :



Gambar 3. Sasaran Stretejik Pusat Penyuluhan Tahun 2015 - 2019

BAB V PENYUSUNAN PENDANAAN

Pendanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2015 – 2019 selama lima tahun sesuai dengan RPJMN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara akumulasi dapat dilihat pada tabel 5, berikut :

Tabel 5. Baseline penganggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019.

No.	IKU dan IKK	Target						Alokasi (Rp. Milyar)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, 5.500 unit KTH (IKU)	625	1.205	1.220	1.220	1.230	5.500	29,6	47,0	49,1	50,8	53,5	230,0
1)	Meningkatkan kelas kelompok tani desa - desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH.	600	1.100	1.100	1.100	1.100	5.000	23,1	38,0	39,0	40,0	41,0	181,1
2)	Terfasilitasinya pembentukan 500 unit koperasi KTH.	25	105	120	120	130	500	1,1	3,6	4,0	4,0	5,0	17,7
3)	Tersedianya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit.	33	47	50	60	60	250	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5	11,2
4)	Tersediannya tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa - desa hutan, 5.000 orang .	600	800	1.000	1.200	1.400	5.000	4,1	2,9	3,6	4,3	5,0	19,9

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019 setelah disesuaikan dengan Renstra BP2SDM, dituangkan secara rinci pada tabel 6.

Tabel.6 Indikator Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkat pemula ke madya, 5000 unit.	522 unit	450 unit	1350 unit	1339 unit	1339 unit
2.	Jumlah koperasi KTH yang dibentuk sebanyak 500 unit.	25 unit	22 unit	75 unit	128 unit	250 unit

Lanjutan 3

Lanjutan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3.	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebanyak 250 unit.	33 unit	15 unit	50 unit	75 unit	77 unit
4.	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5000 orang.	600 orang	450 orang	1000 orang	1450 orang	1500 orang

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan untuk mencapai sasaran strategis Pusluh Tahun 2015-2019, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan beserta jajarannya untuk berpacu dengan waktu.

Renstra Pusluh tahun 2015-2019 ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun dan dimungkinkan untuk direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akhirnya, kiranya Allah SWT memberikan karuniaNya kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan peningkatan penyuluhan dalam mendukung Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Amin.

Kepala Pusat,

Dra. Siti Aini Hanum, MA
NIP.195802071984032001

Lampiran 1:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2015-2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkat pemula ke madya, 5000 unit.	522 Unit	450 Unit	1350 Unit	1339 Unit	1339 Unit
2.	Jumlah koperasi KTH yang dibentuk sebanyak 500 unit.	25 Unit	22 Unit	75 Unit	128 Unit	250 Unit
3.	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebanyak 250 unit.	33 Unit	15 Unit	50 Unit	75 Unit	77 Unit
4.	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5000 orang.	600 Orang	450 Orang	1000 Orang	1450 Orang	1500 Orang

Lampiran 2:

A. Sasaran Elemen dan Indikator Elemen Kegiatan Tahun 2015-2019

ELEMEN	SASARAN ELEMEN	INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KETERANGAN
Menyusun Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja penyuluhan LHK.	Tersedianya Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahunan	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahunan.	Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya, 5000 unit.	IKK-1
	Tersedianya dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan	Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan		
	Tersedianya dokumen Programa Penyuluhan.	Penyusunan Dokumen Programa Pusat Penyuluhan.		
	Telaksananya updating data dan penyusunan statistik.	Updating data dan penyusunan statistik.		
	Tersedianya data peningkatan kelas KTH.	Perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas KTH.		
	Tersedianya fasilitasi kegiatan penyuluhan melalui dana dekonsentrasi dan DAK	Fasilitasi dana dekonsentrasi dan DAK		
	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyuluhan.	Penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi penyuluhan.		
Mengembangkan kelas KTH.	Meningkatnya kemampuan KTH.	Pembinaan Teknis KTH.		
		Fasilitasi peningkatan kelas KTH		
		Evaluasi peningkatan kelas KTH		
Tersedianya Metode Penyuluhan.	Meningkatnya prestasi para pelaku pembangunan penyuluhan dalam pembangunan LHK.	Penilaian Lomba Wana Lestari .		
	Meningkatnya motivasi dan kinerja para pelaku pembangunan penyuluhan dalam pembangunan LHK.	Temu Karya Para Pemenang Lomba Wana Lestari.		

ELEMEN	SASARAN ELEMEN	INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KETERANGAN
	Meningkatnya penyebaran kebijakan LHK dan informasi melalui banyak orang.	Penyelenggaraan KIM.		
	Meningkatnya pengetahuan stakeholders dan informasi akan pembangunan LHK melalui pameran.	Penyelenggaraan Pameran.		
Menyusun materi penyuluhan media cetak dan elektronik.	Penyusunan materi penyuluhan media cetak.	Penyusunan dan Publikasi penyuluhan di media.		
	Penyusunan materi penyuluhan media elektronik.	Penyusunan dan Publikasi penyuluhan di media elektronik.		
	Tersedianya buku kerja penyuluh kehutanan PNS.	Penyusunan dan penggandaan buku kerja penyuluh PNS.		
	Terfasilitasinya Workshop pengembangan materi penyuluhan.	Workshop pengembangan materi penyuluhan.		
	Tersedianya buku kerja PKSM.	Penyusunan dan penggandaan buku kerja PKSM.		
	Tersedianya buku saku Penyuluhan.	Penyusunan dan penggandaan buku saku Penyuluhan.		
	Tersedianya manual tentang LP2UKS Wanawiyata Widyakarya.	Penggandaan manual tentang LP2UKS Wanawiyata Widyakarya.		
	Tersedianya anual tentang peningkatan kelas KTH.	Pengandaan manual tentang peningkatan kelas KTH.		
	Tersedianya manual tentang koperasi.	Penggandaan manual tentang koperasi.		
	Tersedianya materi penyuluhan.	Penggandaan materi penyuluhan.		
	Tersedianya buku profil KTH Madya.	Pengandaan buku profil KTH Madya.		
	Tersedianya materi penyuluhan pemberdayaan.	Penggandaan materi penyuluhan pemberdayaan.		
	Tersedianya Buku	Penggandaan Buku		

ELEMEN	SASARAN ELEMEN	INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KETERANGAN
	Profil Teladan Penyuluh Nasional.	Profil Teladan Penyuluh Nasional.		
	Tersedianya Majalah Kenari.	Menyusun dan Penerbitan Majalah Kenari.		
Layanan Perkantoran	Terlaksananya Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi.	Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi.		
	Terlaksananya penyusunan design SPIP.	Penyusunan SPIP.		
	Tersedianya Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan).	Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan).		
	Tersedianya LAKIP Satker Pusluh.	Penyusunan LAKIP Satker Pusluh.		
	Terselenggaranya Penatausahaan BMN.	Penyusunan laporan BMN.		
	Terfasilitasnya Layanan perkantoran.	Layanan perkantoran.		
Mengembangkan kelembagaan usaha KTH di dalam KPH dan HR.	Terfasilitasnya percontohan pemberdayaan masyarakat desa hutan konservasi.	Percontohan pemberdayaan masyarakat desa hutan konservasi.	Terbentuknya Koperasi Kelompok Tani hutan, 500 unit.	IKK-2
		Identifikasi dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha KTH (Koperasi).		
	Terfasilitasnya Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh pendamping koperasi.	Terfasilitasnya Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh pendamping koperasi.		
		Evaluasi pengembangan kelembagaan usaha KTH (Koperasi).		
Mengadakan unit percontohan dan pelatihan usaha kehutanan.	Terfasilitasnya pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Swadaya (LP2UKS).	Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Swadaya (LP2UKS).	Terbentuknya Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS).	IKK-3
		Identifikasi dan		

ELEMEN	SASARAN ELEMEN	INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KETERANGAN
		perencanaan pembentukan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)		
	Terfasilitasinya pemagangan di Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Swadaya (LP2UKS).	Pemagangan di Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Swadaya (LP2UKS).		
	Terfasilitasi percontohan PKSM di KPH.	Fasilitasi percontohan PKSM di KPH.		
Memfasilitasi pembinaan penyuluh Aparatur dan Non Aparatur	Terfasilitasinya pembinaan teknis penyuluh aparatur	Pembinaan teknis penyuluh aparatur	Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH, 5000 orang.	IKK-4
	Terfasilitasinya Pembinaan Teknis Penyuluh Swadaya Masyarakat (PKSM) di KPH dan HR.	Pembinaan Teknis Penyuluh Swadaya Masyarakat (PKSM) di KPH dan HR.		
	Teridentifikasi dan perencanaan pembentukan tenaga pendamping handal bagi KTH.	Identifikasi dan perencanaan pembentukan tenaga pendamping handal bagi KTH.		
	Terfasilitasinya Pembinaan Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta.	Pembinaan Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta.		
Memfasilitasi Kemitraan Penyuluhan.	Terfasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN).	Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN).		
	Terfasilitasi Kesekretariatan Badan koordinasi Nasional (BAKORNAS).	Fasilitasi Kesekretariatan Badan koordinasi Nasional (BAKORNAS).		

B. Sasaran Elemen dan Indikator Elemen Kegiatan per Bidang Tahun 2015-2019.

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sat	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Penyuluhan							
Tersedianya perangkat pengembangan penyuluhan kehutanan	1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahunan.	Dok	1	1	1	1	1
	2. Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan	Dok	1	1	1	1	1
	3. Penyusunan Dokumen Programa Pusat Penyuluhan.	Dok	1	1	1	1	1
	4. Updateting data dan penyusunan statistik.	Lap	1	1	1	1	1
	5. Perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas KTH.	Lap	1	1	1	1	1
	6. Fasilitasi dana dekonsentrasi dan DAK	Lap	1	1	1	1	1
	7. Penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi penyuluhan.	Lap	1	1	1	1	1
	8. Penilaian Lomba Wana Lestari .	Lap	1	1	1	1	1
	9. Temu Karya Para Pemenang Lomba Wana Lestari.	Lap	1	1	1	1	1
	10. Penyelenggaraan KIM.	Paket	1	1	1	1	1
	11. Penyelenggaraan Pameran.	Kali	1	1	1	1	1
	12. Penyusunan dan Publikasi penyuluhan di media.	Peket	3	3	3	3	3
	13. Penyusunan dan Publikasi penyuluhan di media elektronik.	Paket	2	2	2	2	2
	14. Penyusunan dan penggandaan buku kerja penyuluh PNS.	Ekspl	4000	4000	4000	4000	4000
	15. Workshop pengembangan materi penyuluhan.	Orng	95	95	95	95	95
	16. Penyusunan dan penggandaan buku saku Penyuluhan.	Ekspl	1250	1250	1250	1250	1250
	17. Penggandaan manual tentang LP2UKS Wanawiyata Widyakarya.	Ekspl	1000	1000	1000	1000	1000
	18. Pengandaan manual tentang peningkatan kelas KTH.	Ekspl	1000	1000	1000	1000	1000
	19. Penggandaan manual tentang koperasi.	Ekspl	1000	1000	1000	1000	1000

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sat	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	20. Penggandaan materi penyuluhan.	Ekspl	1000	1000	1000	1000	1000
	21. Pengandaan buku profil KTH Madya.	Ekspl	1000	1000	1000	1000	1000
	22. Penggandaan materi penyuluhan pemberdayaan.	Ekspl	1000	1000	1000	1000	1000
	23. Penggandaan Buku Profil Teladan Penyuluh Nasional.	Ekspl	1000	1000	1000	1000	1000
	24. Menyusun dan Penerbitan Majalah Kenari.	Edisi	2	2	2	2	2
	25. Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi.	Paket	1	1	1	1	1
	26. Penyusunan SPIP.	Lap	1	1	1	1	1
	27. Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan).	Lap	19	19	19	19	19
	28. Penyusunan LAKIP Satker Pusluh.	Lap	1	1	1	1	1
	29. Penyusunan laporan BMN.	Lap	1	1	1	1	1
	30. Layanan perkantoran.	Lap	1	1	1	1	1
Ketenagaan Penyuluhan							
Peningkatan kapasitas penyuluh aparatur dan non aparatur	1. Fasilitasi percontohan PKSM di KPH.	Orang	50	50	50	50	50
	2. Fasilitasi percontohan PKSM di KPH.						
	3. Pembinaan teknis penyuluh aparatur	Orang	450	450	450	450	450
	4. Pembinaan Teknis Penyuluh Swadaya Masyarakat (PKSM) di KPH dan HR.	Orang	50	50	50	50	50
	5. Identifikasi dan perencanaan pembentukan tenaga pendamping handal bagi KTH.	Lap	1	1	1	1	1
	6. Pembinaan Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta.	Orang	50	50	50	50	50
	7. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN).	Lap	1	1	1	1	1
	8. Fasilitasi Kesekretariatan Badan koordinasi Nasional (BAKORNAS).	Lap	1	1	1	1	1
Kelembagaan Penyuluhan							
Pemantapan kelembagaan penyuluhan	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH	Unit	522	450	1.350	1.339	1.339

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sat	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	b. Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH.	Lap	1	1	1	1	1
	c. Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH.	Orang	68	68	68	68	68
	d. Evaluasi peningkatan kelas KTH	Lap	1	1	1	1	1
	e. Percontohan pemberdayaan masyarakat desa hutan konservasi.	Unit	25	25	25	25	25
	f. Identifikasi dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha KTH (Koperasi).	Lap	22	22	22	22	22
	g. Terfasilitasinya Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh pendamping koperasi.	Org	30	30	30	30	30
	h. Evaluasi pengembangan kelembagaan usaha KTH (Koperasi).	Unit	22	22	22	22	22
	i. Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Swadaya (LP2UKS).	Unit	15	15	15	15	15
	j. Identifikasi dan perencanaan pembentukan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	Lap	25	25	25	25	25
	k. Pemagangan di Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Swadaya (LP2UKS).	Lokasi	10	10	10	10	10